

Khazanah

Jurnal Ilmu Agama Islam

Jurnal Khazanah	Volume VI	Nomor 2	Halaman 81-136	Bandung Juni 2010	ISSN 1412-372X
-----------------	--------------	------------	-------------------	----------------------	-------------------

Diterbitkan oleh :
Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung
dan
Asosiasi Sarjana Ilmu Agama Islam Indonesia

Khazanah

Jurnal Ilmu Agama Islam

Volume VI, Nomor 2, Islam Kontemporer, Juni 2010, 81-136

Daftar Isi

Gerakan Islamisme di Indonesia Melacak Tipologi Dakwah Salafi Pascaruntuhnya Orde Baru <i>(Muhammad Qarib)</i>	81-90
Unsur Dan Corak Teologi Himpunan Mahasiswa Islam Studi Analitis Terhadap Nilai-Nilai Dasar Perjuangan HMI <i>(Ahmad Agus Sulthonie)</i>	91-101
Resolusi Islam Terhadap Ekonomi Kapitalistik <i>(Anton Minardi)</i>	102-115
Saintifikasi Islam Menurut Kuntowijoyo <i>(Nani Widiawati)</i>	116-126
Syari'at Islam dan Pemberlakuannya Menurut Ulil Abshar Abdalla <i>(Sulaeman)</i>	127-136

RESOLUSI ISLAM TERHADAP EKONOMI KAPITALISTIK

Anton Minardi

Doktor Ilmu Politik, dosen HI Unpas, Unjani, Unikom, Unpar dan Direktur Humanity Care.
HP. 08170285363, 02275194104. Email: antonminardi@yahoo.com.

Abstract: Islam is an integralistic system in science and action where no separation between Allah's direction with environment management dan human, can be solution for every economic conflicts. Economic conflict always happen caused by error of thought and human unpatience in exploiting natural resources freely with capitalistic management. Islam in this case gives best solution for capitalistic management with Islamic economy and politic.

Keywords: Resolution, Islam, Capitalistic Economy.

Saat ini terjadi kesenjangan yang sangat menganga antara kesejahteraan dengan kemiskinan. Secara umum orang yang minoritas (kaya) menguasai kekayaan bumi, sedangkan orang yang mayoritas (miskin) memiliki sedikit dari kekayaan bumi. Akibatnya orang miskin hanya bagian sedikit dari kekayaan yang semestinya membuat mereka lebih sejahtera¹. Penyebab utama hal tersebut adalah karena *error of thought* dan manajemen yang kapitalistik. Kondisi senjang seperti itu menimbulkan konflik yang besar dan berkepanjangan. Untuk itu perlulah kita kembalikan pada konsep semula mengenai pengelolaan kekayaan bumi dan pemanfaatannya agar semua penghuni bumi ini merasakan kesejahteraan secara lebih adil².

Untuk memulai bahasan mengenai ekonomi yang berkeadilan, perlulah kita membahas kenapa, bagaimana, dan apa solusi konflik itu.

Setiap manusia memiliki kepentingan yang terkadang berbeda satu sama lainnya, sehingga benturan antar kepentingan juga sulit dihindari. Tetapi mungkinkah kepentingan yang berbeda tersebut tidak berbenturan tetapi menjadi saling menghargai atau bahkan sinergi? Mungkin hal tersebut tidak mustahil terjadi ketika semua pihak dapat menyadari posisi dan perannya masing-masing. Dimana setiap orang memiliki empati untuk saling menghargai dan memenuhi kebutuhan hidupnya.

Konflik tidak dapat dihindari ketika para pihak tidak menyadari posisi dan perannya masing-masing, ditambah juga karena tidak mau menghargai perbedaan. Konflik dapat bersumber dari perbedaan pemahaman, kepentingan, sikap dan tindakan. Konflik dapat berupa perselisihan pendapat, perbedaan kepentingan maupun benturan tindakan³.

Konflik dapat terjadi pada keluarga, masyarakat, negara dan internasional. Konflik keluarga biasanya disebabkan karena rasa tidak adil dan rasa cemburu pada anggota keluarga; konflik masyarakat dapat

¹ Lihat Eko Prasetyo, *Islam Kiri Jalan Menuju Revolusi Sosial* (Yogyakarta: Insist Press, 2004).

² Lihat Ismail R. Al-Faruqi, *Hakikat Hijrah* (Bandung: Mizan, 1994).

³ Lihat Maswadi Rauf, *Konsensus Politik* (Jakarta: Dirjen Dikti, 2000).

disebabkan karena perbedaan kepentingan kelompok; konflik pada tingkat negara biasa terjadi antara kepentingan yang berbeda antar masyarakat atau masyarakat dengan negara; dan konflik internasional terjadi di antara perbedaan kepentingan individu atau masyarakat dengan individu atau masyarakat di negara lain, atau antar negara dengan masyarakat atau dengan negara lainnya. Konflik pada tingkat keluarga dan masyarakat biasanya dapat diselesaikan melalui musyawarah, perjanjian atau proses pengadilan, sementara konflik pada tingkat negara dan internasional harus diselesaikan dengan proses mediasi dan yudikasi atau pengadilan⁴. Konflik pada tingkat keluarga, masyarakat dan tingkat negara tersebut membawa dampak yang cukup luas, tetapi konflik internasional menyebabkan dampak yang jauh lebih luas bahkan dapat mempengaruhi peradaban manusia.

Konflik internasional pada masa Perang Dunia I dan II berkisar pada konflik politik ekspansi wilayah teritorial dan konflik militer⁵. Selama Perang Dingin (*Cold War*) terjadi konflik ideologi dan politik antar dua kutub kekuatan Komunis dengan Demokratis. Pasca Perang Dingin konflik beralih kepada pertama konflik Peradaban dimana seolah-olah Barat menghadapi Peradaban Timur khususnya Islam⁶. Kedua, konflik terjadi di seputar kemanusiaan; ketiga, distribusi sumber daya alam, keempat lingkungan hidup; dan kelima, hak cipta. Konflik di seputar kemanusiaan meliputi konflik antar etnis, pelanggaran hak azasi manusia, migrasi manusia (*illegal migration*), penyelundupan dan penjualan manusia (*human smuggling and trafficking*), peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang (*drug abuse*), pekerja di bawah umur, dan pelecehan seksual terutama pada wanita. Konflik mengenai distribusi sumber daya

alam meliputi praktek penyelundupan hasil-hasil bumi, produk-produk ilegal, pencemaran produk dan penyebaran virus serta berbagai wabah lainnya⁷. Konflik di seputar lingkungan meliputi kerusakan hutan akibat penebangan liar (*illegal logging*) yang mengakibatkan kegundulan hutan dan longsor, pemancingan liar (*illegal fishing*), kerusakan lingkungan akibat industrialisasi, kekurangan air bersih, pemanasan global (*global warming*). Semen-tara konflik mengenai hak cipta meliputi perebutan hak mereka, pembajakan hak cipta dan penjiplakan karya.

Zaman terus bergulir dunia semakin tua. Manusia semakin banyak sementara sumber daya alam semakin menipis. Sumber daya alam yang terbatas itu harus dibagi kepada jumlah manusia yang semakin banyak. Permintaan semakin banyak sementara persediaan semakin sedikit, menyebabkan harga-harga semakin tinggi. Semakin terbatasnya sumber daya alam dan tingginya harga-harga membuat berbagai negara harus melakukan penghematan bahkan proteksi, atau menjaga keamanan sumber daya alam sekaligus mengamankan penguasaan terhadapnya. Setiap negara merasa perlu untuk mengamankan aset-asetnya dan mengamankan seluruh kepen-tingannya baik yang ada di negaranya atau di luar Negara-nya⁸. Aset-aset itu termasuk bahan-bahan produksi, situasi dan kondisi yang mendukung sama pasar bagi hasil-hasil produknya.

Kondisi sumber daya alam seperti itulah yang telah mendorong dunia internasional untuk lebih peduli terhadap masalah-masalah distribusi kebutuhan hidup manusia dibanding mengurus masalah-masalah ideologi⁹. Selain itu manusia saat ini dituntut untuk melakukan efisiensi dalam menggunakan sumber daya alam terutama minyak dan

⁴ Lihat Teuku May Rudi, *Hukum Internasional* (Bandung: Refika Aditama, 2002).

⁵ Lihat Samuel Paul Huntington, *Clash of Civilization*.

⁶ Lihat Mazin Shalah al-Mutabaqani, *Strategi Amerika Menghancurkan Gerakan Islam* (Jakarta: Robbani Press, 2003).

⁷ Lihat Ralf Emmers, *Non-Traditional Security in The Asia-Pacific* (Singapore: Marshall Cavendish International, 2004).

⁸ Lihat Joseph A. Camilleri, *Religion and Culture in Asia Pasific: Violence or Healing?* (Melbourne: Vista Publications, 2001).

⁹ Lihat Zeenat Kausar, *Colonialization to Globalization*.

gas, air serta kekayaan hutan. Kita dituntut juga untuk mencari sumber daya pengganti sumber energi minyak dan gas dengan sumber daya alamiah lainnya yang ramah lingkungan. Keterbatasan sumber daya alam itulah yang telah memicu persaingan antara negara atau masyarakat untuk dapat lebih banyak menguasai sumber-sumber berharga dan hampir langka tersebut¹⁰.

Tidak cukup peduli saja tetapi bagaimana semua pihak menyiapkan upaya untuk "mengamankan" persediaan sumber daya alam, jalur distribusinya dan pemanfaatannya. Berbagai upaya ditempuh agar persediaan sumber daya alam mencukupi, distribusi lancar dan aman, kualitas hidup manusia meningkat dan lingkungan sekitar sehat. Bagaimana pun konflik sulit dihindari karena masing-masing pihak baik masyarakat maupun negara berjalan sesuai *frame of reference* masing-masing yang berbeda. Hal tersebut dapat kita lihat dari praktek negara yang berdasarkan sosialisme, komunisme, liberalism dan Islam. Nampaknya konflik saat ini lebih dipengaruhi oleh praktek liberalism, maka masyarakat dunia termotivasi untuk melakukan perebutan dan penguasaan terhadap sumber-sumber daya alam dan jalur-jalur distribusinya¹¹. Lalu saat ini Islam disebut-sebut sebagai alternatif bagi terwujudnya dunia yang lebih sehat, berkualitas dan sejahtera, dengan alasan bahwa Islam mengajarkan praktek ekonomi dan politik yang berkeadilan¹². Begitu pula bahwa Islam diketahui memberikan solusi bagi konflik yang berlangsung saat ini¹³.

Konflik dapat dikategorikan sebagai konflik konvensional dan non konvensional. Konflik konvensional mencakup konflik ideologi, politik dan militer. Sementara konflik non konvensional mencakup konflik ekonomi, kemanusiaan, lingkungan dan

peradaban. Tulisan ini bertujuan menawarkan bagaimana Islam memberikan solusi terhadap konflik yang terjadi saat ini. Secara umum solusi Islam bagi konflik internasional itu bersifat preventif (mencegah) dan kuratif (mengobati). Islam semenjak awal mengingatkan bahwa setiap kerusakan di muka bumi ini akibat dari perbuatan manusia itu sendiri. "Telah nyata kerusakan di bumi dan lautan karena ulah manusia"¹⁴.

Pada awalnya kerusakan di muka bumi itu berasal dari dua sebab. *Pertama*, kesalahan dalam berfikir. *Kedua*, ketidaksabaran manusia. Penyebab kerusakan pertama dimana manusia memisahkan antara manusia dan alam dengan Tuhannya. Pengkajian mengenai manusia, alam dan Ketuhanan seolah tidak ada kaitannya, masing-masing pengkajian berjalan sendiri-sendiri. Sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan adalah sekuler dan telah menghasilkan peradaban yang sekuler pula. Suatu produk automotif mereka, Honda diproduksi beserta dengan buku petunjuk operasional dan buku service nya. Tidak akan cocok jika merek tersebut menggunakan buku petunjuk operasional dan buku servicenya merek Suzuki. Meskipun ada kesamaan tetapi dapat dipastikan tidak akan sama persis. Manusia diciptakan dengan hukum-hukum kemanusiaannya, begitu pun dengan monyet pasti diciptakan dengan hukum-hukum kemonyetannya. Kita dapat bayangkan apabila manusia menggunakan hukum monyet dan monyet menggunakan hukum manusia¹⁵. Kejadiannya adalah kecacauan, manusia akan berperilaku seperti monyet sedangkan monyet tidak akan hidup bebas dan tidak akan seperti manusia.

¹⁰ Lihat George Lencowsky, *Bara Api di Timur Tengah*.

¹¹ Lihat Francis Fukuyama, *TRUST*.

¹² Lihat A. Mannan, *Sistem Ekonomi Islam*.

¹³ Lihat Yusuf al-Qordhowy, *Pedoman Bernegara Dalam Perspektif Islam* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 1999).

¹⁴ QS. Ar-Rum:41.

¹⁵ Teori Evolusi Darwin tidak bisa menjelaskan evolusi hukum monyet yang sampai sekarang tetap hidup dengan hukum tidak beradabnya.

Posisi puncak ditempati oleh Tuhan (Allah SWT.), sebelah bawah sebenarnya alam karena selain Allah SWT. adalah alam. Hanya karena manusia sebagai aktor utama di bumi maka manusia diposisi sebelah kanan dan alam di sebelah kiri. Allah SWT. mempengaruhi manusia dan alam dengan hukum-hukum dan *qudrah* (perbuatan)-Nya. Manusia mempengaruhi alam, dan alam mempengaruhi manusia. Akan tetapi manusia dan alam tidak dapat mempengaruhi Allah SWT. dalam segala kondisi¹⁶.

Posisi tersebut berarti bahwa Allah SWT. yang telah menciptakan alam dan manusia beserta dengan aturan-aturan hidupnya¹⁷. Tidak mungkin alam dan manusia hidup tanpa aturan dari-Nya. Jika alam dan manusia hidup dengan menjalani hukum-hukum yang tidak sesuai dengan hukum Allah SWT, maka akan rusak bahkan binasa. Ketika ilmu pengetahuan dan teknologi tidak menyesuaikan diri dengan hukum-hukum ilahi tersebut, maka dapat diprediksi dan kenyataan menunjukkan kerusakan itu sedang berlangsung saat ini. Pengelolaan manusia dilakukan dengan aturan yang tidak "manusiawi", dan pengelolaan alam lainnya juga menggunakan yang tidak "alami" hasilnya kerusakan yang terjadi. Manusia makan dan minum dengan makanan dan minuman manusia, berperilaku seperti fitrah manusia seharusnya¹⁸. Alam dikelola, digunakan dan dieksploitasi secara "alami". Ketika sebaliknya manusia memakan dan meminum yang bukan untuk manusia dan berperilaku tidak seperti manusia, pasti kerusakan dan degradasi moral terjadi. Begitu pula alam jika tidak dikelola tidak menurut karakter alamiahnya, pasti akan menuai bencana.

Penyebab kedua yaitu ketidak sabaran manusia terhadap sumber daya alam dan hasil-hasil produk manusia¹⁹. Ketidak sabaran manusia mewujudkan ke dalam perilaku

untuk menguasai sumber daya alam secara maksimal dengan cepat. Pengambilan sebanyak-banyaknya sumber kekayaan alam untuk mengambil keuntungan dan dengan cara yang tidak mengindahkan ekosistem alam, mengakibatkan ketidak seimbangan alam. Ketidakseimbangan alam inilah yang menyebabkan bencana alam. Ketidak sabaran untuk memiliki dan menguasai berbagai produk manusia dilakukan dengan cara pencurian, pemilikan secara ilegal, dan pengalihan hak milik orang lain secara tidak sah. Akibat dari perilaku tersebut maka akan ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Pihak yang dirugikan itu akan melakukan *Clash Action* terhadap yang dianggapnya merugikan, akhirnya akan terjadi konflik dan ketegangan bahkan perang.

Islam yang bersifat integralistik dalam ilmu dan amal perbuatan sesungguhnya tidak memisahkan antara ajaran Allah SWT. dengan pengelolaan alam dan manusia²⁰. Pembahasan mengenai Islam dalam memberikan solusi terhadap konflik akan dijelaskan melalui bagaimana Islam memberikan jawaban mengenai hak asasi manusia, lingkungan, ekonomi, politik, dan militer.

Tulisan ini bertujuan untuk mengemukakan konsep-konsep Islam dalam memberikan jawaban terhadap konflik yang bermula dari masalah ekonomi. Walaupun bahasan kita adalah ekonomi, tetapi karena ekonomi yang berlaku merupakan kebijakan politik maka perlu juga dibahas bagaimana solusi Islam dalam bidang politik. Islam menurut penulis memandang konflik adalah suatu yang lazim terjadi. Hanya saja Islam tidak menghendaki konflik berujung pada perusakan dan penghancuran. Konflik diawali dengan adanya pertentangan antara kebenaran (*al-haq*) dan keburukan (*al-bathil*). Kebenaran berasal dari Allah SWT. sedangkan keburukan datangnya dari syetan. Walaupun sebenarnya syetan ini tidak sebanding dengan Allah SWT. sang *khaliq*, tetapi syetan telah mendeklarasikan diri untuk

¹⁶ Lebih lanjut lihat Armahedi Mahzar, *Filsafat Integralisme*.

¹⁷ QS. An-Nas: 1-3.

¹⁸ QS. Ar-Rum: 30-31.

¹⁹ QS. Al-A'raf: 56.

²⁰ QS. Al-Ashr: 1-3.

menyesatkan dan mencelakakan manusia. Manusia sendiri diciptakan secara fitrah akan melakukan pertentangan bahkan "partumpahan darah", hanya Islam menghendakinya dalam kerangka untuk menegakkan dan membela kebenaran²¹.

Konflik dalam Islam sebenarnya tidak dikehendaki, hanya ketika kebenaran akan ditegakkan akan ada pihak-pihak yang tidak menyukai tegak dan berjalannya kebenaran tersebut. Pihak tersebut adalah syetan dengan *wadia balad*-nya²². Setiap ada upaya untuk melaksanakan ajaran kebenaran Ilahi pasti akan ada upaya untuk menghalang-halangi dan menyimpangkan dari jalan kebenaran itu. Kenapa demikian, karena syetan telah ditetapkan sebagai penghuni Neraka secara kekal dan mereka menghendaki supaya banyak yang menemaninya di sana. Hal demikian juga karena mereka dengki kepada Adam as. yang dianggapnya telah membuat dia dikutuk oleh Allah SWT.²³ Sehingga syetan ingin membalasnya dengan berupaya sekuat tenaga menyesatkan anak cucu dan keturunan Adam as. Islam sesuai namanya sesungguhnya menghendaki kedamaian, keselamatan agar terwujudnya kesejahteraan. Konflik yang akan terjadi sedapat mungkin dihindari oleh umat Islam, selama tidak menyangkut urusan *aqidah* (keyakinan). Artinya bahwa jika ada upaya pemurtadan dan upaya paksa untuk meninggalkan keyakinan Islam, maka wajib hukumnya untuk berkonflik atau mengadakan perlawanan. Tetapi jika urusannya hanya perbedaan kepentingan sosial, ekonomi dan politik Islam tidak menganjurkan untuk berkonflik, malahan Islam menganjurkan untuk kerjasama. Kerjasama tersebut dilakukan dalam urusan keduniaan semata dan selama tidak mencampurkan agama.

Maswadi Rauf mendefinisikan konflik adalah sebuah gejala sosial yang selalu terdapat di dalam setiap masyarakat dalam setiap kurun waktu. Konflik dapat diartikan

sebagai setiap pertentangan atau perbedaan pendapat antara paling tidak dua orang atau kelompok. Bila konflik tersebut tidak dapat diselesaikan, ia dapat meningkat menjadi konflik fisik, yakni dilibatkannya benda-benda fisik dalam perbedaan pendapat²⁴.

Paling tidak ada empat ciri konflik. Keempatnya adalah: 1) ada dua atau lebih pihak yang terlibat, 2) mereka terlibat dalam tindakan-tindakan yang saling memusuhi, 3) mereka menggunakan tindakan-tindakan kekerasan yang bertujuan untuk menghancurkan, melukai, dan menghalang-halangi lawannya, dan 4) interaksi yang bertentangan ini bersifat terbuka sehingga bisa dideteksi dengan mudah oleh para pengamat yang independen²⁵.

Beberapa model penyebab konflik: 1) Teori konflik Clifford Geertz menyatakan bahwa penggunaan nilai-nilai primordial (hubungan darah, agama, suku, bahasa, asal daerah, adat istiadat) dalam politik adalah sesuatu yang harus dihindari²⁶. 2) Teori Maurice Duverger menyatakan bahwa konflik dapat ditimbulkan oleh sifat-sifat pribadi dan karakteristik kejiwaan yang dimiliki oleh individu. Konflik terbagi dua yaitu konflik individu dan konflik kelompok. Konflik individu disebabkan adanya bakat-bakat individual dan sebab-sebab psikologis. Sedangkan konflik kelompok adalah perjuangan kelas, isu-isu rasial, dan konflik antara kelompok horizontal²⁷. 3) Teori Karl Marx menyatakan bahwa konflik dapat ditimbulkan karena faktor ekonomi. Faktor

²⁴ Maswadi Rauf, *Konsensus Politik Sebuah Penjajagan Teoritis*. (Jakarta: Dirjen Dikti Diknas. 2000). 2.

²⁵ *Ibid.*, 7.

²⁶ Clifford Geertz (penyunting), *Old Society and New States. The Quest for Modernity in Asia and Africa*. (New York: The Free Press, 1963), 105-157. Karya ini diterjemahkan ke dalam judul *Ikatan-Ikatan Primordial dan Politik Kebangsaan di Negara-Negara Baru*, dimuat dalam buku Juwono Sudarsono (penyunting) berjudul *Pembangunan Politik dan Perubahan Politik*. (Jakarta: Gramedia, 1976), 110.

²⁷ Maurice Duverger, *The Study of Politics*. Thomas Y. Corwell. 1972. Diterjemahkan ke dalam *Sosiologi Politik*. (Jakarta: Rajawali, 1982), 171-273.

²¹ QS. Al-Baqoroh:30.

²² QS. Al-Baqoroh:257.

²³ QS. Al-Baqoroh:36.

ekonomi ini yang telah menimbulkan solidaritas kelompok (Kelas). Terjadi pengelompokan pada dua kelompok atau kelas yaitu kelas orang kaya dan kelas orang miskin. Kedua kelas ini dibedakan oleh kepemilikan alat-alat produksi. Kelas orang kaya terdiri dari orang-orang yang memiliki alat produksi, sedangkan kelas miskin adalah mereka yang tidak memilikinya. 4) Teori James C. Scott yang menyatakan bahwa konflik berasal dari hubungan patron-klien. Scott memberikan definisi kelompok patron klien sebagai hubungan *dyadic* (dua orang) yang terdiri dari seorang dengan status sosioekonomi yang lebih tinggi (patron) yang menggunakan pengaruh dan sumber-sumber kebutuhan hidup (*resources*) yang dimilikinya untuk memberi perlindungan dan keuntungan bagi orang lain (klien) yang membalasnya dengan memberikan dukungan dan bantuan, termasuk pelayanan pribadi, bagi patron²⁸.

Berdasarkan 4 model konflik di atas, justru Islam yang tidak memandang keempat faktor tersebut sebagai sumber konflik. Malah sebaliknya bahwa Islam memandang bahwa perbedaan itu adalah fitrah dan sumber potensi untuk sebuah kemajuan²⁹. Islam menurut penulis mengakui akan adanya perbedaan secara primordial, perbedaan karakter dan sifat individual, perbedaan kelas ekonomi dan perbedaan patron-klien. Keempat perbedaan tersebut ditujukan untuk menguji siapa yang paling baik amal-amalnya selama hidup (QS. Al-Mulk:2). Setiap manusia dilahirkan dalam kondisi sama dan setara yaitu fitrah dan tidak mengetahui serta tidak memiliki apa pun. Prestasi manusia tidak dipandang dari kepemilikan dan kedudukan orang tuanya tetapi dipandang dari seberapa berilmu dan upaya yang bersangkutan dalam kehidupannya³⁰. Adapun seseorang lahir dari keluarga yang memiliki tingkat kehidupan yang lebih baik dari

yang lainnya, maka padanya diberikan beban untuk membantu orang yang kekurangan³¹.

Sesungguhnya manusia diciptakan secara berbeda. Berbeda jenis kelamin, suku dan bangsa. Perbedaan tersebut justru dimaksudkan untuk suatu integrasi (*ta'aruf*), yaitu saling mengenal agar saling melengkapi (QS. Al-Hujurat:13). Allah SWT. Sengaja tidak menciptakan manusia dengan bentuk, bahasa, keahlian dan kemampuan yang sama, tujuannya adalah agar terjadi kerjasama dan keharmonisan. Lebih dari 5 milyar manusia di muka bumi ini tidak ada yang sama baik dalam bentuk maupun rupa. Semua itu diciptakan-Nya agar menjadi bukti kebenaran Ilahi dan mendorong manusia bersyukur kepada-Nya. Konflik yang terjadi di tengah-tengah manusia disebabkan karena manusia itu tidak memerankan tugas dan fungsinya secara baik. Jika tugas dan fungsinya manusia dijalankan dengan baik dan benar pastilah tidak akan terjadi kecemburuan sosial yang akan mendorong kepada konflik. Konflik dalam Islam ditolerir selama berkaitan dengan kompetisi dan berkaitan dengan upaya ibadahnya manusia kepada Ilahi. Konflik di luar itu tidak dapat dibenarkan oleh Islam.

Islam mengajarkan bahwa kehadiran risalah Islam di muka bumi ini adalah sebagai rahmat bukan sebagai pemicu konflik. "Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam"³². Ajaran ini wajib diajarkan kepada seluruh umat, tetapi tidak ada paksaan bagi siapa saja yang menolaknya. "Tidak ada paksaan dalam agama. Sesungguhnya telah jelas petunjuk kebenaran dari kesesatan" (QS. Al-Baqarah:256). Islam justru memotivasi manusia untuk memilih jalan keselamatan dengan cara mengikuti hukum alam (*sunnatullah*). Setiap perbedaan potensi yang ada diarahkan untuk mencapai "Ridho Ilahi" bukan untuk saling menguasai, apalagi saling melemahkan³³. Semua potensi ma-

²⁸ James C. Scott, *Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia* dalam *The American Political Science Review*, Vol. LXVI, 1972, 96.

²⁹ Lihat QS. Al-Hujurat:13.

³⁰ QS. Al-Mulk:2.

³¹ QS. At-Taubah:60.

³² QS. Al-Anbiya:107.

³³ QS. AL-Anfal:46.

nusia ditujukan untuk berbuat kebaikan di dunia ini, untuk mendapatkan balasan yang baik dalam kehidupan nanti di akhirat. Islam mengingatkan bahwa kehidupan dunia ini juga bukan babak akhir hidup manusia, tetapi ini adalah babak setelah alam ruh dan alam rahim. Setelah kehidupan dunia ini kita akan mengalami dua alam lagi yaitu alam barzakh (kubur) dan alam akhirat yaitu alam terakhir di mana kita akan kekal hidup selamanya di sana³⁴.

Kehidupan dunia ini bukan yang terakhir jadi bukan tempat manusia untuk merasakan dan melakukan apa saja, tetapi dunia ini menurut Islam adalah tempat di mana kita dituntut untuk melakukan yang terbaik dalam hubungannya dengan Tuhan dan hubungannya dengan manusia. Setelah itu kita akan dievaluasi selama hidup di dunia untuk mendapatkan balasannya di akhirat. Dengan demikian manusia tidak melakukan apa yang terlarang dilakukan dan menjalankan apa yang seharusnya dijalankan. Apabila itu dapat dilakukan dengan baik maka yang terwujud adalah keadilan dan kesejahteraan bersama. Konflik akan minimal, dan kemajuan akan dicapai secara lebih pesat.

Itulah sebenarnya yang diharapkan. Konflik yang minimal dan keharmonisan yang terjadi itu akan banyak membawa dampak positif terhadap lingkungan³⁵. Keharmonisan yang terjadi dapat mencegah manusia untuk saling menguasai, sehingga salah satu wujud konkrit adalah tidak akan terjadi perebutan penguasaan sumber daya alam. Jika perebutan sumber daya alam tidak terjadi maka tidak akan mungkin timbul perang, dan pasti akan mencegah munculnya korban. Tetapi Bagaimana pun saat ini konflik telah terjadi, perebutan sumber daya alam dan konflik kemanusiaan sedang berlangsung. Jalan yang banyak ditempuh adalah menjaga dan mengamankan sumber-sumber kebutuhan dan kelangsungan hidup masyarakat dan negara.

Keterbatasan sumber daya alam dan distribusinya, pergerakan manusia dari suatu daerah menuju daerah lainnya, serta klaim hak intelektual yang sering terjadi menimbulkan perlu adanya upaya pengamanan (*securitization*). *Security is about survival. It is when an issue is presented as posing an existential threat to a designated referent object* (traditionally, but not necessarily, the state, incorporating government, territory, and society)³⁶.

Seiring dengan perkembangan pengelolaan sumber daya alam, kepentingan manusia dan positioning para pemegang otoritas, saat ini konflik memasuki era baru. Konflik tersebut menurut The Copenhagen School meliputi : *military security, as well as environmental, economic, societal and political security*³⁷.

Konflik saat ini lebih banyak terjadi pada bidang militer, lingkungan, ekonomi, sosial dan politik. Konflik di bidang militer diakibatkan adanya persaingan kemampuan pasukan dan persenjataan militer, persaingan bisnis militer, sampai dengan memperkuat jangkauan wilayah kekuasaan (hegemoni). Konflik di bidang lingkungan akibat industrialisasi yang tidak memperhatikan kelestarian ekosistem, penebangan hutan secara liar, peladang berpindah, atau kebakaran hutan³⁸. Konflik di bidang ekonomi akibat terjadi ketimpangan pembangunan, migrasi dari daerah minim ke daerah yang plus secara illegal, persaingan yang tidak setara antara pemilik modal dengan yang tidak memiliki modal, pencurian hasil laut, pembajakan, dan sengketa sumber daya alam. Konflik di bidang sosial diakibatkan ketimpangan tingkat pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat, penyelundupan dan penjualan manusia, peredaran narkoba, dan konflik etnis. Konflik di bidang politik ter-

³⁶ Berry Buzan, *Security: A New Framework for Analysis*, (Boulder, Co.: Lynne Rienner, 1998), 21.

³⁷ Ralf Emmers, *Non-Traditional Security in The Asia-Pacific The Dynamics of Securitization*, (Eastern Universities Press by Marshall Cavendish, 2004), 3.

³⁸ Lihat Adnan Harahap dkk., *Islam dan Lingkungan Hidup* (Jakarta Pusat: Yayasan Swarna Bhumi, 1997).

³⁴ QS. Ghafir:39.

³⁵ QS. Al-Maidah:2.

jadi adanya perbedaan ideologi dan kepentingan, cara-cara fitnah dan kekerasan dalam mencapai tujuan, separatisme dan perlawanan terhadap kepentingan asing.

Menurut Islam konflik yang terjadi saat ini adalah bukan hanya dapat diselesaikan dengan cara pengamanan (*securitization*) terhadap aset-aset vital bagi kehidupan. Penyelesaian dengan cara pengamanan tersebut sebenarnya akan menimbulkan masalah yang baru yaitu berbagai pihak yang memiliki berbagai kepentingan tersebut akan berusaha mengamankan kepemilikan di dalam negerinya dan berupaya menguasai sumber-sumber daya alam yang ada di luar negerinya³⁹. Islam memberikan solusi yang lebih komprehensif, yaitu *pertama*, dengan mengembalikan kepada fungsi fitrah manusia⁴⁰. *Kedua*, mengembalikan posisi fitrah lingkungan (alam)⁴¹. Ketiga, mendudukkan manusia secara setara dengan tidak membedakan ras, bangsa dan negara untuk duduk bersama dalam menangani berbagai persoalan dunia⁴².

Tawaran Islam ini pastilah sangat idealis, tetapi realitas konflik yang saat ini berlangsung memang karena manusia meninggalkan tuntutan idealitas semestinya. Untuk itu penulis memandang bahwa perlu dibahas tema-tema berikut ini yaitu: Islam dan Hak Azasi Manusia, Islam dan Lingkungan, Islam dan Ekonomi, Islam dan Politik dan Islam dan Militer.

PEMBAHASAN

Islam merupakan sistem kehidupan bagi terpelihara dan tertibnya kelangsungan hidup alam semesta. Islam adalah aturan operasional alam dan manusia untuk menjalani kehidupannya. Secara general syariat Islam itu sendiri bertujuan untuk : *Pertama*, menjaga agama. *Kedua*, menjaga diri. *Ketiga*, menjaga harta. *Keempat*, menjaga ke-

turunan. *Kelima*, menjaga lingkungan⁴³. Pada kesempatan ini penulis hanya akan membahas bagaimana Islam memberikan solusi terhadap ekonomi yang mengedepankan kebebasan untuk menguasai sumber-sumber ekonomi yang akhirnya “merampas” hak-hak asasi umat manusia yang sama-sama berhak hidup dan sejahtera di dunia ini.

Kelestarian dan kesejahteraan alam dan manusia akan tercapai jika Islam dilaksanakan⁴⁴. Agar kondisi tersebut terwujud maka Islam mengarahkan manusia mulai dari urusan kelahiran manusia, perilaku dalam hidup, sampai kepada urusan kematian⁴⁵. Urusan kelahiran tercakup dalam bahasan mengenai hak azasi manusia; urusan perilaku hidup tercakup dalam bahasan mengenai lingkungan, ekonomi, politik dan militer. Sementara mengenai kematian, Islam mengarahkan semua urusan kelahiran dan perilaku hidup semuanya untuk menjemput kematian dan semua aktifitas dalam kehidupannya diarahkan sebagai upaya membekali diri untuk menjalani kehidupan yang abadi setelah kematian tersebut.

Islam dan Ekonomi

Islam menganjurkan manusia untuk tidak melupakan kehidupan dunia walaupun menegaskan keharusan berorientasi kepada akhirat. “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan kehidupan dunia, dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”⁴⁶.

Manusia diperintahkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara halal dan baik agar terjaga kesehatan diri dan sosialnya. “Wahai manusia manusia makanlah apa yang ada di bumi dari yang halal

³⁹ Lihat Salim Fredericks, *Invasi Politik dan Budaya* (Bogor: Pustaka Thoriqul Izzah, 2004).

⁴⁰ QS. Al-Baqoroh:30.

⁴¹ QS. Al-A'rof:56.

⁴² QS. Al-Hujurat:13.

⁴³ Lihat Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991).

⁴⁴ QS. Al-A'rof:96.

⁴⁵ QS. Al-Maidah:3.

⁴⁶ QS. Al-Qoshosh:77.

dan baik, dan janganlah kalian mengikuti cara-cara syetan, karena sesungguhnya mereka adalah musuh kalian yang nyata". "Sesungguhnya dia menyuruh kalian kepada perbuatan jelek dan keji dan mengatakan atas nama Allah apa yang kalian tidak mengetahui⁴⁷.

Islam, barangkali hanya satu-satunya agama yang memberikan nilai sangat tinggi dan positif secara hukum terhadap aktivitas ekonomi⁴⁸. Hasil dari kegiatan ekonomi, dipertimbangkan sebagai rahmat Allah SWT.⁴⁹ beberapa ayat Al-Qur'an di bawah ini, memberikan gambaran pikiran itu:

"Maka, mereka kembali dengan nikmat dan karunia (yang besar) dari Allah, mereka tidak mendapat bencana apa-apa, mereka mengikuti keridhaan Allah. Dan Allah mempunyai karunia yang besar" (QS. Ali Imron:174).

"Dan, janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi (bantuan) kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah" (QS. An-Nur:22).

"Apabila telah ditunaikannya sholat, maka bertebaranlah kamu di bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu ber-untung" (QS. Al-Jumuah:10).

"Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah..." (QS. Al-Mujammil:20).

Prinsip-prinsip ekonomi Islam adalah:

1. Keadilan: "...untuk menegakkan hukum secara adil..." (QS. An-Nisa:58).
2. Profesionalisme: "Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk memberikan amanah kepada ahlinya...(QS. An-Nisa:58).

3. Anti Riba: "Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba..." (QS. Al-Baqoroh:275).

4. Pemerataan Kesejahteraan dan Bukan Kapitalisme: "Agar (kesejahteraan) tidak hanya beredar di antara orang-orang yang kaya di antara kalian (saja)..." (QS. Al-Hasyr:7).

5. Kerja sama: "Dan bekerja samalah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah bekerja sama dalam dosa dan permusuhan" (QS. Al-Maidah:2).

Ekonomi Islam tidak sama dengan komunisme atau pun kapitalisme⁵⁰. Islam membagi kepemilikan menjadi kepemilikan pribadi dan kepemilikan bersama. Kepemilikan individual melahirkan hukum warits sementara kepemilikan bersama memberikan kewenangan kepada negara untuk mengelola milik bersama tersebut. Kedua bentuk kepemilikan itu sesungguhnya ditujukan untuk kesejahteraan bersama. Kepemilikan individu memiliki tanggung jawab sosial terhadap kondisi ekonomi masyarakat sekitarnya (sekarang dikenal dengan *corporate social responsibility*, Islam lebih jauh lagi memiliki konsep *individual sosial responsibility*). Terutama negara memiliki tugas dan tanggung jawab yang utama untuk mensejahterakan masyarakatnya⁵¹.

Islam memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk mencari nafkah bagi kelangsungan hidupnya selama dilakukan dengan cara-cara yang dibenarkan syari'at, dan ditujukan untuk pengabdianya kepada Ilahi⁵². Akan tetapi menyangkut kepemilikan bersama Islam menetapkan regulasi yang jelas. Selain untuk menjaga eko sistem lingkungan tetapi juga untuk menghindari praktek monopoli. Rasulullah SAW. bersabda: "Kaum muslimin berserikat atas tiga

⁵⁰ Lihat Abu A'la Al-Maududi, *Esensi Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1995).

⁵¹ Lihat Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam* (Jakarta: Gema insan press, 1996).

⁵² Lihat Abu A'la Al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan* (Bandung: Mizan, 1998).

⁴⁷ QS. Al-Baqoroh:167-168.

⁴⁸ QS. Al-Hasyr:7.

⁴⁹ QS. Al-A'rof:156.

perkara yaitu: air, api (energi) dan ladang gembala (tanah)" (Hadits). Ketiga hal tersebut merupakan sumber pokok kehidupan bersama, jadi tidak boleh dimiliki oleh seseorang. Selain tiga hal tersebut manusia dibolehkan untuk melakukan praktek bisnis. Bisnis dalam Islam dibolehkan selama tidak melalaikan dari beribadah kepada Allah SWT.⁵³

Individu di dalam Islam diberikan kebebasan untuk mengekspresikan kepentingan ekonominya selain dari tiga sumber kehidupan tersebut yaitu air, energi dan tanah. Sementara itu mengenai bidang-bidang ekonomi yang berkaitan dengan kebutuhan pokok bersama, negara berwenang untuk mengelola dan menentukan regulasinya untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat. Untuk itu negara berwenang mendapatkan sumber-sumber pendapatan yang luas untuk membiayai pembangunan dan perjuangannya dalam mewujudkan kesejahteraan duniawi dan ukhrowi.⁵⁴

Sumber pendapatan negara yaitu berasal dari : zakat (pengeluaran umat Islam sebagai pembersih dari hartanya), infaq, shodaqoh, hibah dan waqaf (pemberian umat Islam yang jumlahnya tidak ditentukan), ghanimah (harta rampasan perang), fa'i (harta yang dikembalikan dari kafir tanpa melalui peperangan), kharaj (sewa tanah dan pajak tanah), jizyah (pajak non muslim).⁵⁵

Ciri khas ekonomi Islam yaitu *Pertama*, jelas berstandar halal dan haram. *Kedua*, ekonomi dilakukan dengan cara terbuka dan dengan saling ridho. *Ketiga*, ekonomi non ribawi. *Keempat*, menggunakan mata uang real (nyata) bukan hayalan seperti emas dan perak. *Kelima*, tidak bersifat judi (*gambling*). *Keenam*, jual-beli barang atau jasa secara nyata. *Ketujuh*, memberikan keleluasan individu untuk berkreasi dan sekaligus memberikan wewenang kepada ne-

gara untuk mengelola sumber daya alam untuk kepentingan masyarakat bersama⁵⁶.

Islam dan Politik

Islam memang diakui dan terbukti memiliki konsep dan sistem kehidupan yang sempurna. Semua aspek kehidupan tidak lepas dari pengaturan Islam yang memiliki sifat universal, agar manusia menemukan kesejahteraan hidupnya secara hakiki⁵⁷. Dalam kehidupan politik, menurut Bernard Lewis Islam menawarkan cakrawala pemikiran yang paling luas dalam berbagai formulasi gagasan, pada satu sisi mengenai norma-norma sosial dan hukum, sedangkan di sisi yang lainnya mengenai berbagai kebaikan dan aspirasi yang baru. Islam memberikan simbol-simbol yang paling efektif untuk mobilisasi politik, apakah untuk membangkitkan masyarakat untuk mempertahankan suatu rezim atau untuk melawan suatu rezim yang dianggap kurang memiliki legitimasi. Untuk dapat memahami politik Islam, perlu memahami gerakan-gerakan dan perubahan-perubahan yang dipersepsikan serta diekspresikan dalam istilah-istilah Islam, kita harus berusaha memahami bahasa perdebatan politik di antara umat Islam, kata-kata yang mana yang digunakan dan yang dipahami, dan kerangka kerja yang mana yang biasanya digunakan dalam seluruh komunikasinya. Bahasa politik Islam yang orisinal yang menyangkut berbagai aspek dalam Islam ditunjukkan dalam Al-Qur'an, Sunnah Rasul, dan praktek dari kaum Muslim yang terdahulu⁵⁸.

Bidang politik khususnya negara sebagaimana sosial, ekonomi, militer, budaya, pertahanan dan keamanan, dijelaskan secara lebih rinci baik secara konseptual maupun praktis. Negara menurut para ahli

⁵³ Lihat Al-Farabi, *Al-Madinah Al-Fadhilah*.

⁵⁴ Lihat Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995).

⁵⁵ Lihat Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam* (Bangil: AL-Izzah, 1996).

⁵⁶ Lihat lebih lanjut A.A. Ishlahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*. (Surabaya: Bina Ilmu-Surabaya, 1997).

⁵⁷ Lihat Abu A'la Al-Maududi, *Esensi Al-Qur'an*.

⁵⁸ Bernard Lewis, *The Political Language of Islam* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1988), 5-6.

politik dan kenegaraan Islam, dijelaskan secara rinci dalam peradaban Islam. Secara konseptual dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, secara praktis dicontohkan oleh Nabi SAW. dan Khulafa' al-Rosyidin. Umat Islam tidak bisa hidup tanpa "negara Islam", karena terpisahnya umat dari negara dapat berarti mematikan ruh Islam itu sendiri⁵⁹. Hal tersebut dibuktikan dengan puluhan tahun umat Islam disekulerkan dan dijauhkan dari kehidupan politik, akhirnya seolah "macan yang dikeluarkan dari hutan" diompongi giginya, dicabuti cakarnya. juga dikerangkeng.

Negara jelas memiliki landasan *teologis, historis, sosiologis, politis, dan praktis*⁶⁰. Ibadah tidak akan sempurna bahkan tidak akan sah apabila syarat-syarat syariatnya tidak dipenuhi. Seperti sholat yang mengharuskan menutupi aurat, atau haji yang membutuhkan alat transportasinya. Apalagi untuk menegakkan keadilan, maka mesti ada lembaga yang memiliki otoritas untuk menegakkan hukum dan rewardnya. Pakaian untuk menutupi aurat dapat berarti keharusan adanya pabrik pakaian, haji karena tempatnya jauh tentu membutuhkan kapal laut dan kapal udara berarti pesawat itu sendiri menjadi harus adanya. *Maa laa yatimmu illa bihi fahuwa wajibun*⁶¹. Apalagi perintah-perintah dan isyarat mendirikan negara ada dalam nash Al-Qur'an dan Hadits. Terminologi *Khalifah, Imam, Ulil Amri, Syura, Hakim, Jihad Amwal-Anfus*, dan *Jihad Qital* di antara konsep-konsep dasar kenegaraan dalam Islam.

Pertama landasan teologis, konsep kehidupan menunjukkan kedaulatan Allah SWT. yang dikonseptualisasikan melalui Trilogi Tauhid.

Kedua landasan historis, Piagam Madinah menjadi landasan berdirinya negara

Madinah yang penduduknya pluralistis.

Ketiga landasan sosiologis, setiap manusia butuh bermasyarakat, dan masyarakat butuh pemimpin dan pengaturan.

Keempat landasan politis, setiap manusia memiliki keinginan dan kepentingan yang ingin diraihinya, dan kepentingan itu perlu akan suatu pengaturan yang dapat meagregasikan setiap kepentingan secara adil.

Kelima landasan praktis, tujuan hidup untuk beribadah pada prakteknya membutuhkan sarana dan pra sarana. "*Maa laa yatimmu illa bihi fahuwa wajibun*".

Sejumlah konsep mengenai kenegaraan ditemukan dalam berbagai referensi masa kini yang sekaligus memperkuat pandangan para ahli terdahulu seperti Ibnu Taimiyah, Muhammad Rasyid Ridha, Ibnu Khaldun, Al-Mawardi, Al-Farabi, dan Abul A'la Al-Maududi, yang intinya berpandangan bahwa dalam Islam terdapat konsep negara dan metode perealisasiannya⁶².

Berikut ini adalah konsep dasar negara dalam Islam. *Pertama*, kepemimpinan dikenal dalam konsep Ulil Amri yang berarti kepemimpinan representasi dari masyarakat atau kepemimpinan yang melaksanakan kehendak rakyat sesuai dengan aspirasi mereka. Prinsip ini mengharuskan diangkatnya seorang kepala pemerintahan (*eksekutif*)⁶³. *Kedua*, prinsip *syura'* menunjukkan wajib terwujudnya suatu lembaga perwakilan rakyat yang mengurus masalah-masalah yang menyangkut konstitusi, dan undang-undang yang mengatur seluruh mekanisme kehidupan bernegara dan bermasyarakat (*legislative*)⁶⁴. *Ketiga*, Islam menurut para ulama salaf (masa klasik) seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun dan ulama kholaf (masa kini) seperti Hasan Al-Banna dan Taqiyuddin An-Nabhani Islam memerintahkan untuk menetapkan hukuman dan menegakkan keadilan di dalam masyarakat.

⁵⁹ Lihat Abu Ridha, *Islam & Politik Mungkinkah Bersatu?* (Bandung: Syamil, 2004).

⁶⁰ Lebih jelas lihat A. Hasjmy, *Dimana letaknya Negara Islam?*

⁶¹ Lebih lanjut lihat Abu Abadul Fattah bin Ali Ben Haj, *Negara Ideal Menurut Islam* (Jakarta: Ladang Pustaka & Intimedia, 2002).

⁶² Lebih rinci dijelaskan dalam Disertasi Doktor Anton Minardi berjudul: *Konsep Negara Menurut Islam* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007).

⁶³ QS. An-Nisa:59.

⁶⁴ QS. Asy-Syuro':38.

kat baik muslim maupun non muslim. Prinsip ini mengharuskan berdirinya suatu lembaga kehakiman (yudikatif) atau adanya Qadhi atau Hakim, yang tidak untuk menentukan suatu hukum tertentu, tetapi bertugas membuat keputusan hukum⁶⁵.

Keempat, prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar yaitu menyampaikan setiap perintah syari'at dan mencegah terjadinya kemunkaran atau penyimpangan⁶⁶. Pelaksanaan daripada prinsip ini berarti meminta berdirinya suatu lembaga kontrol baik terhadap pemerintah maupun masyarakat. *Kelima*, prinsip mempertahankan hak asasi manusia, melindungi warga negara dari serangan musuh dan menjaga negara, mewajibkan untuk didirikannya suatu lembaga pertahanan atau yang dikenal dengan Amirul Jihad⁶⁷.

Konsep negara Islam ini merupakan landasan bagi para penyelenggara pemerintahan Muslim⁶⁸. Implementasinya dapat berupa pendirian sebuah negara Islam atau dapat berupa suatu upaya penerapan esensi daripada nilai-nilai syari'at Islam dalam landasan, tujuan dan mekanisme kenegaraan dan kemasyarakatan⁶⁹. Formal atau tidak formalnya implementasi dari konsep negara Islam tersebut tergantung daripada pemahaman dan kesadaran masyarakat pemeluknya⁷⁰. Terimplementasinya syari'at Islam dalam setiap urusan kehidupan merupakan wujud dari sistem kemasyarakatan dan kenegaraan Islami⁷¹.

KESIMPULAN DAN SARAN

Uraian singkat di atas menjelaskan kepada kita bahwa Islam memang bersifat

antisipatif terhadap setiap persoalan yang mungkin akan muncul. Islam membentengi manusia dan alam agar tidak berbenturan dan bentrok kepentingan. Prinsip-prinsip Islam tersebut insya Allah memberikan pengamanan (*security*) secara komprehensif.

Konflik ekonomi pada intinya bermuara pada ketidakadilan dan keserakahan sebagian manusia yang kapitalistik. Islam mengantisipasi dua hal tersebut dengan menjamin terselenggaranya keadilan dan mencegah keserakahan manusia. Syari'at Islam pada intinya bertujuan untuk menjaga agama, jiwa dan keturunan manusia, harta, kehormatan dan lingkungan. Syari'at Islam bukan buatan manusia yang memandang dirinya dan alam secara terbatas, tetapi ia merupakan tuntunan dari sang Pencipta manusia dan alam yang mengetahui betul seluk-beluk, kebutuhan dan keserasian manusia dan alam ciptaan-Nya.

Kerusakan ekosistem lingkungan, pelanggaran hak azasi manusia, ketidakadilan dan ketimpangan ekonomi, politik kotor, dan cara-cara terorisme dan permasalahan nuklir dan senjata pemusnah massal lainnya dalam militer tidak akan terjadi jika Islam dilaksanakan secara konsisten. Perusakan lingkungan yang menyebabkan krisis sumber daya alam tidak akan terjadi jika manusia selalu ingat kepada tugas pokok dan fungsi sebagai kholifah. Hak azasi manusia sangat dijunjung tinggi dalam Islam sehingga para pelanggarnya akan mendapatkan hukuman yang tegas. Kesenjangan ekonomi tidak akan terjadi ketika prinsip keadilan dan kesejahteraan bersama diterapkan dengan menghindari praktek riba, *gambling*, melaksanakan *individual and corporate social responsibility* (ICR-CSR), bisnis dilakukan secara terbuka dan semua pelaku bisnis dalam kondisi ridho, memberikan keleluasaan individu untuk berbisnis, air-energi dan tanah dikuasai dan dikelola oleh negara, serta menerapkan mata uang nyata seperti emas dan perak bukan hayalan seperti kertas. Dengan demikian tidak akan terjadinya monopoli, kesenjangan, korupsi dan penumpukan kekayaan di sebagian masyarakat.

⁶⁵ QS. An-Nisa:58 dan 65.

⁶⁶ QS. Ali Imron:104 dan Al-Hajj:41.

⁶⁷ QS. An-Nisa:135, Ali Imron:110, dan Al-Hajj:78.

⁶⁸ Lihat Abu A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1995).

⁶⁹ Lihat M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam menurut Fazlur Rahman* (Yogyakarta: UII Press, 2000).

⁷⁰ Lihat M. Rusli Karim, *Negara dan Peminggiran Islam Politik* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999).

⁷¹ Lihat Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara* (Jakarta: UI Press, 1993).

Politik dilaksanakan secara arif bijaksana dengan memberikan amanah kepada para ahlinya, hukum yang berlaku sesuai dengan hukum Allah SWT., kompetisi dari berbagai kepentingan secara *fair*, dan pemerintahan ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat. Terorisme tidak dibenarkan dan perang hanya dibolehkan ketika sudah tidak ada cara lain untuk menyelesaikan konflik. Islam juga karena tidak memperbolehkan cara-cara berperang secara berlebihan dan bersifat memusnahkan, maka Islam tidak membenarkan adanya senjata nuklir dan senjata pemusnah massal.

Jelaslah sesungguhnya Islam memberikan solusi yang lengkap bagi ekonomi kapitalistik yang terjadi saat ini. Bahkan secara konseptual Islam lebih bersifat mencegah terjadinya konflik. Sekarang permasalahan yang belum terjawab sesungguhnya adalah regulasi yang ada adalah yang tidak Islami, aturan Islaminya belum terkodifikasi dalam aturan positif (berlaku), lembaga pelaksanaannya belum terwujud, dan manusia yang konsisten untuk melaksanakan aturan tersebut masih sangat sedikit dan kebanyakan belum profesional.

Semoga dengan terus-menerus disosialisasikannya konsep-konsep yang mendekatkan kembali manusia dan alam kepada fitrahnya, bertambah orang yang mengetahui akan kondisi kerusakan lingkungan dan bertambahnya orang yang sadar akan *sunnatullah* yang seharusnya berlaku. Ketika orang sudah membutuhkan solusi yang nyata dan efektif untuk menyelesaikan berbagai persoalan hidup khususnya ekonomi kapitalistik yang terjadi, maka semakin serius upaya untuk mewujudkan Islam sebagai solusi. Persoalan kehidupan memang tidak akan pernah selesai dengan hanya usaha manusia semata. Solusi yang real yang dapat menyelesaikan masalah tanpa mendatangkan masalah yang baru hanyalah solusi yang didatangkan oleh Allah SWT. Dia yang menciptakan, Dia pula yang Maha Mengetahui bagaimana mencegah timbulnya permasalahan dan juga bagaimana menyelesaikan se-

tiap persoalan. *Wallahu A'lamu bi Al-Showab.*

Daftar Rujukan

- Al-Faruqi, Ismail R., *Hakikat Hijrah* (Bandung: Mizan, 1994).
- Al-Maududi, Abu A'la, *Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1996).
- Al-maududi, Abu A'la, *Pokok-Pokok Ajaran Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1993).
- Buzan, Barry, *Security: A New Framework for Analysis*, (Boulder, Co.: Lynne Rienner, 1998).
- Camilleri, Joseph A., *Religion and Culture in Asia Pasific: Violence or Healing?* (Melbourne: Vista Publications, 2001).
- Duverger, Maurice, *The Study of Politics*. Thomas Y. Corwell. 1972. Diterjemahkan ke dalam *Sosiologi Politik*. (Jakarta: Rajawali, 1982).
- Emmers, Ralf, *Non-Traditional Security in The Asia-Pacific The Dynamics of Securitization*, (Eastern Universities Press by Marshall Cavendish, 2004).
- Geertz, Clifford, (penyunting), *Old Society and New States. The Quest for Modernity in Asia and Africa*. (New York: The Free Press, 1963). Karya ini diterjemahkan ke dalam judul *Ikatan-Ikatan Primordial dan Politik Kebangsaan di Negara-Negara Baru*, dimuat dalam buku Juwono Sudarsono (penyunting) berjudul *Pembangunan Politik dan Perubahan Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1976).
- Harahap, Adnan, dkk., *Islam dan Lingkungan Hidup*. (Jakarta: Yayasan Swarna Bh-umy, 1997).
- Ishlahi, A.A., *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*. (Surabaya: Bina Ilmu, 1997).
- Lewis, Bernard, *The Political Language of Islam*. (Chicago and London : The University of Chicago Press, 1988).
- Prasetyo, Eko, *Islam Kiri Jalan Menuju Revolusi Sosial* (Yogyakarta: Insist Press, 2004).
- Rauf, Maswadi, *Konsensus Politik Sebuah Penajagan Teoritis*. (Jakarta: Dirjen Dikti Diknas, 2000).

- Rudi, Teuku May, *Hukum Internasional* (Bandung: Refika Aditama, 2002).
- Scott, James C., *Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia* dalam *The American Political Science Review*. Vol. LXVI, 1972.
- Syekh Sayukat Hussain. *Human Right in Islam* (terjemahan). (Jakarta: Gema Insani Pres-s, 1996).
- Hadits Riwayat Abu Dawud, Bab Jihad, dan Hadits Riwayat Ahmad.